

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya, konsep bisnis diciptakan untuk perusahaan agar mereka bisa menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan finansialnya tetap sehat. Supaya tujuan tersebut tercapai, perusahaan membutuhkan berbagai sumber daya untuk menjalankan bisnisnya, baik yang berasal dari alam maupun bukan. Tetapi pada akhir tahun 1980-an, tema mengenai pembangunan yang berkelanjutan mulai bermunculan dan menyinggung perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam. Tema tersebut mempertanyakan tanggung jawab perusahaan yang seharusnya tidak hanya kepada pemilik modal saja, tetapi juga kepada generasi selanjutnya (IAI, 2015).

Tema mengenai pembangunan berkelanjutan semakin marak diperbincangkan, hingga pada tahun 1987. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendefinisikan pembangunan berkelanjutan dan menyelenggarakan perundingan terkait Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2015. Dilansir dari sdg2030indonesia.org, SDGs memiliki tujuan untuk memutus rantai kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan dari kerusakan (SDGs 2030 Indonesia, 2017a).

Sebanyak 193 negara ikut serta dalam peresmian Agenda SDGs, termasuk Indonesia pada tahun 2015 yang memiliki 17 tujuan dan 169 target serta berlaku sejak 2016 hingga 2030. Keterlibatan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs dapat

dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat TPB (SDGs 2030 Indonesia, 2017b).

Pelaksanaan SDGs di Indonesia dan dunia juga terbantu oleh adanya peran dari kementerian, filantropi dan pelaku bisnis/ usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam dunia akademisi, penelitian terkait SDGs telah muncul dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk bisnis dan manajemen (Annan-Diab and Molinari, Schaltegger et al., Storey et al., dalam Bebbington & Unerman (2017)). Penelitian yang dilakukan oleh Bebbington & Unerman (2017) ingin menunjukkan keterlibatan akademi akuntansi berpeluang untuk membantu memastikan bahwa intervensi akuntansi terkait SDGs memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs. Hal tersebut dapat tercermin dari penelitian-penelitian yang terus dilakukan oleh akademisi dan terciptanya kerangka kerja teori akuntansi yang dipengaruhi dan berkesinambungan dengan SDGs, serta profesi seorang akuntan juga sudah sering terbukti di tingkat global yang berhubungan dengan SDGs yaitu mereka telah bekerja keras dalam upaya untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan pelaporan perusahaan.

Satu tahun setelah penelitian internasional mengenai peran dari salah satu pihak yang andil dalam terlaksananya SDGs, keikutsertaan pelaku bisnis/ usaha di Indonesia telah disampaikan oleh (Darajati, 2018) melalui presentasinya yang mengemukakan bahwa pelaku usaha yang tercermin sebagai perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional bisa didukung untuk menerapkan

implementasi keberlanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan di dalam siklus pelaporan perusahaan masing-masing.

Penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa unit usaha bisnis ikut andil dalam pelaksanaan SDGs dan mereka membutuhkan informasi seiring berkembangnya kondisi lingkungan ekonomi dan juga perkembangan informasi. Informasi yang baik dapat menciptakan komunikasi yang baik antara manajemen dengan pihak yang berkepentingan lainnya dan salah satu informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan-laporan perusahaan sebagai unit bisnis (Ramadani, 2017).

Laporan keuangan perusahaan yang baik dapat memberikan informasi yang berkualitas sehingga komunikasi yang ideal dapat tetap terjaga dan membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, laporan keuangan menjadi sangat penting karena sebagai sarana penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan.

Sebuah unit bisnis membutuhkan informasi yang relevan agar operasi perusahaan yang dijalankan dapat terus dijaga keberlangsungannya. Informasi tersebut tidak hanya berasal dari segi finansial saja tetapi segi non finansial juga menjadi elemen penting yang mendasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Darajati (2018) tentang pengintegrasian informasi akan berkaitan erat dengan model pelaporan terbaru di perusahaan yang disebut *Integrated Reporting*. Laporan tersebut mengintegrasikan informasi finansial dan non finansial ke dalam satu model pelaporan perusahaan.

Model pelaporan perusahaan telah mengalami banyak perubahan yang beriringan dengan berkembangnya dunia bisnis yang memiliki semakin banyak tuntutan mengenai kelengkapan informasi yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban perusahaan. Pelaporan perusahaan juga memiliki peran penting dalam dunia bisnis (García-Sánchez et al., 2019). Perusahaan mulai mengalami banyak tuntutan dari kebutuhan pasar sehingga harus membuat pelaporan perusahaan yang semakin luas dan kompleks (Wahyuni, 2015). Tuntutan itu sejalan dengan pendapat Fadly (2015) yang menuliskan bahwa laporan keuangan perusahaan saat ini dirasa tidak lagi dapat secara menyeluruh menggambarkan keadaan perusahaan. Maka dari itu, para pemangku kepentingan berharap supaya perusahaan dapat mengungkapkan tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi mengenai lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (PriceWaterhouseCoopers, 2013).

Perkembangan pelaporan perusahaan mengalami perubahan dan dimulai dari laporan keuangan (*financial reporting*) yang lebih menyajikan informasi dan transaksi keuangan masa lalu, namun masih belum menyajikan informasi terkait sosial dan lingkungan. Perkembangan pelaporan terus dilanjutkan hingga menjadi laporan manajemen (*management reporting*) yang hadir sebagai pelengkap *financial reporting* yang juga menyajikan informasi terkait dengan prospek perusahaan ke masa depan. Tetapi laporan manajemen belum memerhatikan aspek lingkungan sebagai unsur yang wajib dilaporkan perusahaan. Maka dari itu, laporan hijau (*green reporting*) menjawab kebutuhan pasar terkait lingkungan dengan tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja, tetapi juga

menitikberatkan pada pelaporan CSR (*CSR reporting*). Namun, laporan hijau masih belum memuaskan kebutuhan pasar karena masih disajikan secara terpisah dan belum menunjukkan kesinambungan dari tahun ke tahun (IAI, 2015; Kustiani, 2017).

Banyaknya jumlah halaman yang membuat laporan semakin lama semakin tebal merupakan kendala yang dialami oleh laporan-laporan yang terus berkembang. Perkembangan pelaporan menuju praktik baru yaitu *sustainability reporting* (SR) dianggap dapat mengatasi kendala tersebut. SR biasanya disajikan secara terpisah dari laporan keuangan karena tujuan kedua pelaporan tersebut berbeda, sehingga pemisahan kedua laporan tersebut dirasa perlu dilakukan. Sistem pemisahan tersebut membuat para pemangku kepentingan harus membaca lebih banyak untuk mendapatkan keseluruhan informasi. Jumlah halaman dalam laporan akan semakin bertambah seiring banyaknya laporan yang harus dibuat oleh perusahaan, sehingga laporan pun akan semakin tebal. Oleh karena alasan di atas, para pembaca dapat kehilangan maksud dan gambaran secara penuh dari nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan (IAI, 2015).

Model pelaporan terbaru bernama *Integrated Reporting* yang disimbolkan <IR>, berusaha mengatasi kendala tersebut. Model pelaporan ini dibuat oleh International Integrated Reporting Council (IIRC) pada tahun 2011 dan didukung oleh pebisnis dan investor lebih dari 25 negara, serta beberapa lembaga penyusun standar internasional. *Integrated Reporting* juga dihadirkan untuk mengatasi pandangan “dikotomi” terkait kinerja perusahaan dengan menghadirkan pandangan “holistik” yang mampu untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu

sehingga aktivitas perusahaan dapat membuahkan hasil yang sesuai. (Adams & Simnett, Abeysekera, Van Bommel, De Villiers et al., Stubbs & Higgins dalam Vitolla & Raimo (2018)).

Menurut The International Integrated Reporting Council (IIRC), *Integrated Reporting* adalah suatu prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan dan dilandaskan pada pemikiran yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan laporan terintegrasi secara periodik tentang penciptaan nilai (*value creation*) dari waktu ke waktu dan komunikasi mengenai aspek penciptaan nilai. Sedangkan *Integrated Report* adalah suatu komunikasi yang singkat dan terintegrasi yang dapat menghasilkan penciptaan nilai dari cara kerja strategi, tata kelola dan remunerasi, kinerja dan prospek suatu organisasi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Integrated Reporting merupakan bentuk penyempurnaan pelaporan perusahaan yang terintegrasi karena menggabungkan informasi finansial dan non finansial. Tetapi perlu ditekankan bahwa sebuah <IR> tidak hanya sekadar menggabungkan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan, tetapi <IR> berfokus pada bagaimana cara perusahaan menciptakan nilai untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

Penyempurnaan pelaporan perusahaan terus dilakukan hingga akhirnya tercetus *Integrated Reporting* yang memiliki lingkup “holistik” dan terintegrasi. Sehingga banyak perusahaan telah menerapkan <IR>, seperti Indonesia, Australia dan beberapa negara Eropa, serta Afrika Selatan yang mewajibkan (*mandatory*) kepada lebih dari 450 perusahaan yang telah terdaftar di Johannesburg Stock

Exchange (JSE) menerapkan <IR> sejak tahun 2010 (The South African Institute of Chartered Accountant (SAICA), 2011). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa <IR> dirasa telah menyempurnakan pelaporan perusahaan, walaupun negara-negara selain Afrika Selatan masih menerapkan <IR> secara sukarela (*voluntary*).

Penelitian terkait <IR> yang telah dilakukan selama ini lebih berfokus pada tatanan konseptual, manfaat, perkembangan dan tantangan perusahaan dalam menerapkan <IR>, sehingga penerapan <IR> harus dengan nyata dilakukan, tidak hanya sekadar wacana (Adams, 2015; Burke & Clark, 2016; Havlová, 2015). Penelitian Kustiani (2017) hadir untuk mengkaji sejauh mana penerapan <IR> di Indonesia melalui penelitiannya terhadap 96 sampel perusahaan yang tersebar ke dalam 8 (delapan) jenis industri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitiannya membuktikan bahwa sebesar 63,8021% atau setara dengan 5 dari 8 konten elemen <IR> telah diterapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya dan sisanya hanya mengungkapkan 3 dari 8 elemen yang setara dengan 37,5%. Serta terdapat 37 perusahaan yang memiliki skor penerapan elemen <IR> melebihi angka rata-rata.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat dibuktikan bahwa perusahaan di Indonesia sanggup menerapkan <IR> sebagai pelaporan perusahaannya. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang pengimplementasian <IR> di Indonesia dan faktor apa saja yang dapat memengaruhi penerapan <IR> (Chariri & Januarti, 2017b). Maka dari itu akan sangat menarik untuk meneliti

lebih jauh terkait penerapan <IR> ini, sehingga menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi keberlanjutan penerapan <IR> di Indonesia pada khususnya.

Apabila dilihat berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan <IR>, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi salah satu pihak yang penting untuk dianalisis karena *stakeholder* dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan melalui tekanan serta intervensi yang mereka berikan. Kemampuan *stakeholder* tersebut yang digunakan pada perusahaan disebut dengan *stakeholder pressure*. Tujuan *stakeholder* menekan perusahaan karena mereka ingin haknya terpenuhi yaitu mendapatkan keseluruhan informasi dan memastikan perilaku perusahaan sudah benar dan valid (Vitolla, Raimo, Rubino, et al., 2019). Tetapi sejauh pengamatan penulis, variabel ini masih jarang diteliti sebagai faktor penentu terhadap <IR>. Hasil penelitian Vitolla et al. (2019) menemukan hasil yang positif antara pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap kualitas <IR> yang berarti semakin manajer perusahaan ditekan oleh *stakeholder*, maka manajer perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan <IR>. Namun hasil yang sebaliknya ditunjukkan oleh Kurniawan & Wahyuni (2018) yaitu tekanan pemangku kepentingan (*stakeholder pressure*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <IR> yang memiliki arti bahwa semakin *stakeholder* menekan perusahaan, maka perusahaan akan semakin mengurangi informasi dalam penerapan dan pelaporan <IR>. Penelitian dari Kurnianto et al. (2020) menemukan hasil yang berbeda bahwa tekanan pemangku kepentingan tidak memberikan pengaruh pada *Integrated Reporting*.

Faktor lain yang patut dianalisis selanjutnya ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan penentu seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan. sehingga menentukan kemampuan perusahaan untuk membiayai pengungkapan informasi yang menyeluruh (Aljifri & Hussainey, 2007). Indrawati (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <IR> dan didukung oleh penelitian dalam negeri yang dilakukan oleh Kurniawan & Wahyuni (2018). Mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <IR>. Penelitian (Ghani et al., 2018) juga mendukung hasil tersebut dengan melakukan penelitian pada Bursa Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan mereka untuk membiayai pengungkapan informasi yang baik, dalam pembahasan kali ini yaitu *Integrated Reporting*.

Salah satu mekanisme internal *Corporate Governance* yaitu komite audit juga dapat memengaruhi penerapan <IR>. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa banyak waktu yang disisihkan oleh anggota maupun pimpinan komite audit dalam mengadakan rapat yang disebut frekuensi rapat komite audit. Mengadakan pertemuan tatap muka untuk memastikan keandalan laporan keuangan, pengawasan internal dan manajemen risiko melalui pengawasan yang bersungguh-sungguh penting untuk dilakukan (DeZoort et al., 2002). Seperti hasil yang disampaikan melalui penelitian Haji & Anifowose (2016) pada Johannesburg Stock Exchange (JSE) yang mengungkapkan bahwa rapat komite audit memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap <IR> dan hasil tersebut juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnianto et al.

(2020). Chariri & Januarti (2017a, 2017b) juga memiliki pendapat yang selaras dengan hasil penelitian tersebut yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <IR> yang diterapkan di JSE maupun di BEI. Rapat yang dilakukan oleh komite audit secara teratur dan intens akan meningkatkan kualitas pembahasan sehingga menghasilkan audit serta informasi yang berkualitas. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan tujuan komite audit untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan dan pengendalian internal.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait <IR> di Indonesia masih jarang dilakukan, terlebih karena pelaksanaannya yang masih bersifat sukarela (*voluntary*), dan populasi yang diteliti belum bervariasi. Maka dari itu, penelitian terkait dengan <IR> dirasa relevan dan harus terus dilakukan agar bisa mengembangkan hasil serta memperluas faktor-faktor yang dapat diteliti terkait <IR>. Penelitian ini akan melakukan pengujian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sesuai dengan pernyataan Kurniawan & Wahyuni (2018), perusahaan dengan skala usaha terbesar dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan dengan skala besar memiliki banyak pihak yang berkepentingan dan masing-masing dari mereka memiliki keinginan berbeda dalam mengintervensi manajer perusahaan. Kemudian, perusahaan besar juga memiliki banyak sumber daya dan modal yang besar sehingga diyakini dapat membiayai pengungkapan pelaporan perusahaan yang terbaik, serta besarnya perusahaan menentukan pengawasan dari komite audit yang harus dilakukan lebih baik lagi demi tanggung jawabnya kepada *stakeholder*.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh tekanan pemangku kepentingan, ukuran perusahaan dan frekuensi rapat komite audit terhadap *Integrated Reporting* dengan mengusung judul **“Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan, Ukuran Perusahaan dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Intagrated Reporting*”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang serta berdasarkan pengamatan penulis, masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi penerapan *Integrated Reporting* di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

1. Apakah tekanan pemangku kepentingan memiliki pengaruh positif terhadap *Integrated Reporting*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *Integrated Reporting*?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *Integrated Reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap *Integrated Reporting*
2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Integrated Reporting*

3. Menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *Integrated Reporting*

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian bertemakan *Integrated Reporting* masih terbatas di Indonesia karena penerapannya yang masih bersifat sukarela, maka dari itu penulis ingin berkontribusi memberikan manfaat literatur. Penemuan ketidaksesuaian hasil dari salah satu variabel independen yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu tekanan pemangku kepentingan, menyebabkan penulis ingin menguji kembali variabel tersebut dan melihat hasil dari sudut pandang lain yang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi karena sejauh pengamatan penulis, hanya terdapat penelitian yang menentukan populasinya pada sektor properti ataupun yang berdasarkan kepada Indeks SRI-KEHATI (*e.g.* (Kurnianto et al., 2020; Kurniawan & Wahyuni, 2018)). Selain itu, perusahaan yang tergolong ke dalam jenis manufaktur adalah skala usaha yang relatif besar, sehingga penerapan <IR> dirasa mampu untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan mengenai pelaporan perusahaan yang mengintegrasikan informasi finansial dan non finansial.